



Daftar Isi

Pengantar — iii

Daftar Isi — vii

BAB I Selayang Pandang Peran DPRD — 1

- A. Pendahuluan — 1
- B. Fungsi Pembentukan PERDA — 2
- C. Fungsi Anggaran — 3
- D. Fungsi Pengawasan — 4
- E. Sekretariat DPRD — 6
- F. Sistematika Penyajian Buku — 8

BAB II	Otonomi Daerah — 9
	A. Kebijakan Desentralisasi — 10
	B. Pengembangan Desentralisasi — 14
	C. Pembentukan Daerah Otonom — 19
	D. Pembagian Urusan Pemerintahan — 27
BAB III	Hubungan KDH dan DPRD — 33
	A. Kedudukan KDH dan DPRD dalam Pemerintahan Daerah — 33
	B. Pemilihan KDH dan Hubungan KDH dengan DPRD — 39
	C. Permasalahan Hubungan antara KDH dengan DPRD — 41
	D. Solusi Permasalahan KDH — 43
	E. Solusi Permasalahan Anggota DPRD — 45
BAB IV	Pemahaman Kerangka Representasi DPRD dan Penjaringan Aspirasi — 47
	A. Kerangka Representasi Rakyat Daerah — 47
	B. Teknik dan Mekanisme Penjaringan Aspirasi Masyarakat — 52
BAB V	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD — 59
	A. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan DPRD belum Optimal — 60
	B. Belum Tersusunnya Agenda Pengawasan DPRD — 61
	C. Arti Penting Pengawasan DPRD — 62
	D. Identifikasi Permasalahan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan — 63
BAB VI	Pengawasan Pelaksanaan PERDA dan Peraturan KDH — 71
	A. Tinjauan Umum Peraturan Daerah — 71
	B. Produk Hukum Daerah Sering Bertentangan dengan Peraturan di Atasnya — 73
	C. Penanganan Produk Hukum yang Bermasalah — 74

- D. Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah — 77
- E. Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan PERDA — 80
- F. Evaluasi terhadap Efektivitas Pelaksanaan PERDA — 83
- G. Rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Daerah tentang Pelaksanaan PERDA — 84
- H. Pengawasan Pelaksanaan Peraturan KDH — 85

BAB VII Pengawasan Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah — 87

- A. Pendahuluan — 87
- B. Identifikasi Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah — 89
- C. Penyiapan Bank Data untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan — 102

BAB VIII Teknik Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah — 105

- A. Faktor Pertimbangan Melaksanakan Pengawasan — 105
- B. Teknis Penyiapan dan Penghimpunan Data/Informasi — 106
- C. Teknis Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Urusan — 114
- D. Teknis Pengawasan Pelaksanaan-Pelaksanaan Urusan Tugas Pembantuan — 153
- E. Teknis Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Tugas Pemerintahan Umum — 153

BAB IX Pengawasan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — 155

- A. Pemeriksaan BPK — 155
- B. Hak Mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dari BPK — 157

- C. Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK — 159
 - D. Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut LHP BPK — 161
- BAB X Pengawasan terhadap LKPJ KDH — 165**
- A. Ketepatan Waktu Penyampaian LKPJ — 165
 - B. Mekanisme Pembahasan Internal terhadap LKPJ — 167
 - C. Penilaian Kinerja terhadap LKPJ KDH — 168
 - D. Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ KDH — 171
- BAB XI Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD — 173**
- A. Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD — 173
 - B. Perencanaan Pembangunan Daerah — 175
 - C. Keuangan dan Aset Daerah — 181
- BAB XII Pengawasan terhadap Kerjasama Daerah dan Internasional di Daerah — 187**
- A. Tinjauan Umum Kerjasama Daerah — 187
 - B. Permasalahan dalam Rangka Kerjasama Antardaerah — 189
 - C. Dampak dalam Kerjasama Daerah dan Internasional — 190
 - D. Pengawasan DPRD terhadap Kerjasama Daerah dan Internasional — 192
- BAB XIII Pengawasan Terhadap Kelembagaan Pemerintah Daerah (OPD) — 195**
- A. Tinjauan Umum Kelembagaan Pemerintah Daerah — 195
 - B. Kecenderungan Memperbesar Organisasi Perangkat Daerah — 196
 - C. Penyebab Kecenderungan Pemerintah Daerah Memperbesar OPD — 198
 - D. Kecamatan — 200
 - E. Pengawasan DPRD terhadap Kelembagaan Pemerintah Daerah — 203

BAB XIV	Pengawasan terhadap Pelayanan Publik dalam Rangka Akuntabilitas Pemerintah Daerah — 207
A.	Tinjauan Umum Pelayanan Publik — 207
B.	Permasalahan Penyelenggaraan Pelayanan Publik — 208
C.	Beberapa Penyebab Tidak Maksimalnya Pelayanan Publik — 209
D.	Pengawasan DPRD terhadap Pelayanan Publik dalam Rangka Akuntabilitas Pemerintah Daerah — 211
BAB XV	Pengawasan terhadap Aparatur Daerah — 215
A.	Tinjauan Umum Aparatur Daerah — 215
B.	Permasalahan Rendahnya Profesionalisme Aparatur Daerah — 217
C.	Dampak Negatif Lain dalam Pengelolaan Aparatur Daerah — 218
D.	Pengawasan terhadap Aparatur Daerah — 220

Daftar Pustaka — 223

Tentang Penulis — 233